

## Papua Barat Resmi Gunakan Produk Layanan Pemda Berbasis Elektronik



Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bersinergi dengan Bank Indonesia dan BPD Papua meresmikan produk layanan Pemda berbasis elektronik untuk mendukung ETPD oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw di Manokwari, Kamis (09/06/2022).

Produk yang diresmikan tersebut adalah QRIS untuk membayar pajak bermotor melalui QRIS, ATM untuk membayar pajak dan retribusi daerah serta peresmian sua pasar yang menggunakan pembayaran QRIS

Peresmian ini sebagai langkah cepat Pemprov Papua Barat merespon Kepres No 3/2021 tentang satuan tugas percepatan digitalisasi daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi eleltronifikasi transaksi pemda (ETkat PD) serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital, mewujudkan keuangan inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional yaitu City Mall (MCM) dan Kalawai Mart.

“Kami berharap dengan peresmian ini dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat untuk mewujudkan kemandirian daerah serta kemudahan masyarakat dalam bertransaksi dengan QRIS,” jelas Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw.

Peresmian tersebut dilakukan di saat kegiatan sinergi event Woman20 (W20) dan Pre event FEKBI BI Provinsi Papua Barat dengan tema “Inclusive Growth Build Resilience: Focus On Rural Women and Women With Disabilities”.

Tak hanya itu saja, guna mendukung era digitalisasi, Pemprov Papua Barat telah memiliki Cash Management System (CMS) untuk mengelola belanja daerah. CMS membantu BPKAD melakukan transaksi pencairan SP2D, karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan sisten yang ada di bank, sehingga kecepatan dan rekonsiliasi data lebih tepat dan serta penyetoran pajak ke negara bisa dilakukan melalui CMS.

Penyediaan berbagai kanal transaksi pemda, baik pengeluaran dan penerimaan daerah menjadi komitmen pemda dalam inklusi transaksi non tunai khususnya melalui pengenalan produk dan jasa keuangan digital.

“Kami juga mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan sinergi guna mendukung percepatan pembentukan ekosistem ekonomi digital, sehingga diharapkan masyarakat, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam peningkatan literasi digital,” katanya.

Penjabat gubernur juga mengajak 13 kabupaten/kota di Papua Barat mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemda baik pengeluaran dan penerimaan daerah serta memanfaatkan digitalisasi dalam proses pemasaran dan penjualan produk.

“Hal ini guna menjadi fasilitas dan dukungan terhadap perempuan pedesaan dan perempuan dengan disabilitas sebagai potensi baru untuk peningkatan ekonomi di Papua Barat,” ujarnya. \*\*

Sumber Berita :

1. [Papua Barat Resmi Gunakan Produk Layanan Pemda Berbasis Elektronik - Papua Inside](#)
2. [Gubernur Papua Barat Dorong Masyarakat Gunakan Metode Pembayaran Elektronik – DISKOMINFOPERSTATIK – PROVINSI PAPUA BARAT \(papuabaratprov.go.id\)](#)
3. [Kadis Kominfo Papua Barat Optimis SPBE 2020 Catatkan Peningkatan Signifikan – DISKOMINFOPERSTATIK – PROVINSI PAPUA BARAT \(papuabaratprov.go.id\)](#)

Catatan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik :
  - a. Pasal 1 Angka 1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
  - b. Pasal 42 yang menyatakan bahwa:

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- c. Pasal 61 yang menyatakan bahwa:
  - (1) Setian kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
  - Pasal 2 Satgas P2DD dibentuk dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk:
    - a. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan
    - b. mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.